

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan *Collaborative Governance* yang dilakukan Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Sukabumi sudah dapat dikatakan baik dimana Langkah Perhutani untuk berkolaborasi sudah tepat karena untuk mengelola hutan yang luas nya lebih dari 5900 Ha dibutuhkan beberapa sektor atau titik dalam pelaksanaannya . Standar prosedur operasional (SOP) yang digunakan Perhutani juga dalam berkolaborasi adalah sesuai dengan anatomi kerjasama dimana standar prosedur yang ada sesuai dengan dokumen perjanjian kerjasama. komunikasi dengan mitra, sosialisasi pemahaman akan kolaborasi, ikut terjun kelapangan dalam pengelolaan hutan seperti penanaman dan penyadapan , juga monitoring dan evaluasi mitra yang mana hal-hal tersebut menunjukkan kepemimpinan Perhutani dalam kolaborasi ini sudah sangat baik.dalam proses kolaborasi yang dilakukan juga sudah sangat baik, dialog tatap muka, membangun kepercayaan, membangun sikap saling memahami, dan membangun komitmen terhadap proses yang dilakukan perhutani dengan mitra sudah baik sekali serta masyarakat juga dapat merasakan dampaknya secara langsung dengan adanya bagi hasil hutan.

Walaupun masih ada kendala kendala yang menghambat pelaksanaan kolaborasi seperti koordinasi dan komunikasi di lapangan saat melakukan pengelolaan hutan sering kali terjadi perbedaan pendapat tentang bagaimana pengelolaan hutan dengan para aktivis hutan dan juga adanya lembaga hutan seperti LMDH yang kurang aktif sehingga menghambat proses pengelolaan hutan. Serta masalah yang paling utama adalah tidak ada kolaborasi antara mereka yang seharusnya terlibat dalam pengelolaan hutan, seperti Dinas Kehutanan,aktivis,dan swasta Beberapa instansi masih menempuh jalannya sendiri dan memperlambat proses

pengelolaan hutan di sektor-sektor tertentu. Aktivis percaya bahwa Perhutani atau dinas kehutanan harus menghasilkan rekomendasi untuk mengikat semua pemangku kepentingan sehingga semua proses pengelolaan dan masalah hutan dapat diselesaikan dengan relatif cepat.

6.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan mengenai *Collaborative Governance* pengelolaan tanah hutan Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Sukabumi . hal yang menjadi masukan dalam *Collaborative Governance* ini adalah :

1. Perhutani perlu memperluas jaringan kolaborasi dengan melibatkan beberapa sektor seperti sektor pendidikan, dimana demi menambah pengetahuan akan kehutan bisa di salurkan melalui sosialisasi ke sekolah yang berada di sekitar hutan. Dan juga Melakukan kolaborasi dengan pihak Swasta untuk menambah wadah untuk saling bertukar informasi, dan juga meningkatkan produksi hasil hutan agar bisa lebih efektif.
2. Perhutani Kedepanya saat akan melakukan komunikasi dan koordinasi dalam penebangan hutan negosiasi harus lebih dulu di tuntaskan, baik dengan para aktivis hutan atau lembaga lainya yang mengawasi hutan seperti dinas lingkungan hidup dan dinas kehutanan selain itu perlu juga pemberian pemahaman tentang tindakan yang dilakukan seperti tujuan dan SOP penebangan pohon atau yang lainya, sehingga jika negosiasi sudah tuntas pengelolaan hutan akan terlaksanakan dengan tanpa masalah.
3. LMDH sebagai mitra perhutani Peningkatan komitmen dalam berkolaborasi, karena demi proses pengelolaan hutan yang baik kedua belah pihak harus lah meningkatkan komitmennya masing-masing dengan cara pendekatan secara emosional dalam bekerja. Hal ini kemungkinan besar akan menimbulkan rasa tanggung jawab karena semua pihak akan merasa diperhatikan. Sehingga, akan mengurangi lembaga lembaga yang kurang aktif dalam pengelolaan hutan